



**PERAN BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PENANGANAN
PASCABENCANA BANJIR DI KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO**

*The Role Of Disaster Management Agency Of Situbondo Regency In Handling
Post-Flood Disaster In Besuki Sub-District*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara jurusan Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**ANIS LISTARINI
NIM 120910201086**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah karena atas rahmatnya, satu kewajiban telah aku selesaikan dan semua ini tulus aku persembahkan sebagai bentuk tanggung jawab, pengabdian, ungkapan terima kasihku, hormat dan kasih sayangku kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. Buhadin dan Ibunda Mahmida yang selalu mendoakanku, memberi semangat, dan selalu sabar mendidik dan membersakanku tanpa dampungan seorang ayah. Terima kasih atas segala kasih sayang yang selama ini tercurah yang kalian berikan kepadaku.
2. Kakaku Nova sholeha, dan kakak iparku Samsur Rizal. terima kasih atas kasih sayang dan doanya, terima kasih telah menjadi bapak ke-2 buat aku dan keluarga.
3. Nenekku Hj. Hanaviah dan kakekku Alm. H. Muhaimin yang selalu menjadi semangat selama ini dan Ivan Dany Yuniardo terima kasih atas doa dan dukungannya.
4. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa membimbingku dari masa kanak-kanak hingga bangku kuliah.
5. Almamater tercinta Universitas Jember yang selalu kubanggakan.

MOTTO

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada tuhan-mulah yang hendaknya kamu berharap”

(QS. AL Insiroh 94 : 6-8)

Lakukan apa yang dapat kamu lakukan hari ini karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok

(Rio Prakarsa Dwi Adiwinata)

¹ QS. AL Insiroh

² www.amazon.com

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Listarini

Nim : 120910201086

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo Dalam Penanganan Pascabencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 08 April 2019

Yang menyatakan

Anis Listarini

NIM 120910201086

SKRIPSI

**PERAN BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN SITUBONDO DALAM PENANGANAN
PASCABENCANA BANJIR DI KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO**

*The Role Of Disaster Management Agency Of Situbondo Regency In Handling
Post-Flood Disaster In Besuki Sub-District*

Oleh:

Anis Listarini

NIM. 120910201086

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Drs. Supranoto, M.Si.,Ph.D

Dosen Pembimbing II : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pascabencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” yang ditulis oleh Anis Listarini NIM 120910201086 telah diuji dan disahkan oleh fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jember pada:

Hari, tanggal : 08 April 2019

Jam : 08:30 WIB

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Drs. Supranoto, M.Si.,Ph.D
NIP. 196102131988021001

Tim Anggota Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP ()
NIP.197410072000121001
2. Tree Setiawan Pamungkas S.A.P., MPA ()
NIP. 199010032015041001

Mengesahkan**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pascabencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ; Anis Listarini; 120910201086; 2019; 82 Halaman; Program Studi Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Bencana dapat datang secara tiba-tiba, dan mengakibatkan kerugian materil dan moril. Salah satu peran pemerintah dalam mengatasi serta membantu bencana yang adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Peneliti ingin meneliti tentang penanggulangan bencana banjir pada tahap pasca-bencana yaitu tentang rehabilitasi dan rekontruksi yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, didasarkan dari data yang diperoleh peneliti yang menunjukkan bahwa Kecamatan Besuki memiliki kerusakan akibat terjadinya bencana dengan jumlah kerusakan yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Pasca Bencana dipilih karena data kerusakan di Kecamatan Besuki yang ditimbulkan oleh bencana banjir dengan mengalami lebih banyak di kerusakan dan tujuan pasca-bencana yaitu untuk pemulihan dan juga perbaikan dari kebutuhan masyarakat.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, khususnya di tahap pasca-bencana. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dan evaluasi tentang peran yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo khususnya BPBD Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi bencana alam. rumusan masalah di penelitian ini adalah Bagaimana peran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pasca-bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini berupaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan metode kualitatif yang akan di deskriptifkan dengan menghasilkan kata-kata yang diperoleh dari narasumber yang dibutuhkan yang menunjang penelitian tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Pasca-Bencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan fakta yang terjadi dan juga pengamatan di lapangan.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2017 sampai data yang dibutuhkan telah tercapai dan selesai, guna memberikan gambaran terkait peran BPBD dalam penanganan pasca bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif oleh Miles dan Hubermann yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat melalui diskusi, dan kecukupan referensi.

Berdasarkan dari hasil penelitian pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran BPBD terhadap bencana banjir yang dialami Kecamatan Besuki pada tahap pasca bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi kurang berjalan dengan baik, yaitu BPBD tidak dapat mengalokasikan dana hibah yang diberikan dari dana APBN dengan Maksimal hal tersebut dapat merugikan warga Kecamatan Besuki yang mengalami bencana banjir, BPBD hanya memberikan bantuan berupa perbaikan jalan utama dan juga pembangunan plengsengan sungai yang akan mencegah terjadinya luapan sungai dan menyebabkan banjir, tetapi untuk pandangan warga kecamatan Besuki tidak mengetahui peran yang telah BPBD lakukan sebenarnya, karena warga di Kecamatan Besuki tidak mengetahui bahwa pemberian bantuan tersebut yaitu datang dari BPBD dalam perencanaan bantuan dan pelaksanaan bantuan yang terjadi di Kecamatan Besuki sehingga

mengira bahwa BPBD tidak berperan aktif dalam membantu dalam tahap pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi.



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan kita Allah Subhana Wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
2. Dr. Edy Wahyudi, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Drs. Supranoto, M.Si.,Ph.D selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
4. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
5. Kedua dosen Pembimbing, Drs. Supranoto, M.Si.,Ph.D dan M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP terimakasih atas segala bimbingan dan ilmu yang Bapak berikan selama penyusunan skripsi ini serta kesabaran yang sangat luar biasa membimbing dan maaf atas segala kekurangan penulis selama ini.
6. Kedua dosen penguji Tree Setiawan Pamungkas S.A.P., MPA dan Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si terimakasih atas segala saran dan bimbingannya.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
8. Terimakasih untuk Bapak Mulyono selaku operator Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu memberikan informasi.
9. Seluruh nara sumber yang telah membantu dan memberikan wawasan kepada penulis yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Bapak Ahmad Taufik, Bapak Samsur Rizal, Bapak Husamah

Bahres dan seluruh anggota karwan BPBD, PUSDALOP dan masyarakat Kecamatan Besuki yang tidak dapat dijabarkan satu persatu.

10. Terimakasih untuk kedua orang tuaku Ibu Mahmida dan Alm. Bapakku Buhadin yang telah merawat, member kasih sayang dan memberi doa sehingga akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakaku Nova sholeha, dan kakak iparku Samsur Rizal, terima kasih atas kasih sayang dan doanya, terima kasih telah menjadi bapak ke-2 buat aku dan keluarga.
12. Nenekku Hj. Hanaviah dan kakekku Alm. H. Muhaimin yang selalu menjadi semangat selama ini dan Ivan dani yuniardo terima kasih atas doa dan dukungannya.
13. Seluruh Sahabat-sahabat terbaikku Desty, Nuriel, Umie, dan teman-teman pith house mbak sindy, mbak kikay, mbak el, reni, puji, mbak ndis, dan mbak depin. Terima kasih atas dukungan dan canda tawa yang kalian berikan selama aku melewati masa-masa penyusunan skripsi.
14. Seluruh teman2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Uniiversitas Jember Angkatan 2012 terimakasih telah memberikan diskusi dan belajar bersama selama ini.
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas segala dukungan dan doanya sehingga skripsi ini terselesaikan walaupun terlambat.

Semoga allah senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunianya yang tanpa henti kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. penulis juga ingin mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang berkepentingan kedepannya.

Penulis, 08 April 2019

Anis listarini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Konsep	11
2.2 Konsep Administrasi Publik	11
2.3 Konsep Organisasi	13
2.3.1 Prinsip dan asas Organisasi	14
2.3.3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15
2.4 Konsep Peran	16
2.4.1 Pengertian Peran	16
2.4.2 Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	18
2.5 Manajemen Bencana	20
2.5.1 Bencana	20

2.5.2 Pasca-Bencana	23
2.6 Kerangka Pemikiran	24
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Pendekatan Penelitian	26
3.2 Tempat dan Waktu	27
3.3 Situasi Sosial	27
3.4 Desain Penelitian atau Rancangan Penelitian Kualitatif	29
3.4.1 Menjelaskan Fokus Penelitian	29
3.4.2 Memilih Informen Sebagai Sumber Data.....	29
3.4.3 Melakukan Pengumpulan Data	30
3.4.4 Analisis Data	30
3.4.5 Menafsirkan Data dan Membuat Kesimpulan atas Temuannya	30
3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data	31
3.5.1 Observasi	31
3.5.2 Wawancara	32
3.5.3 Dokumentasi	32
3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data	33
3.6.1 Perpanjangan Keikutsertakan	34
3.6.2 Ketekunan Pengamatan	35
3.6.3 Triangulasi	35
3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data Triangulasi	35
3.7.1 Reduksi Data	36
3.7.2 Penyajian Data	36
3.7.3 Verifikasi Data	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	38
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	38
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Besuki	42
4.2 Gambaran umum BPBD Kabupaten Situbondo.....	

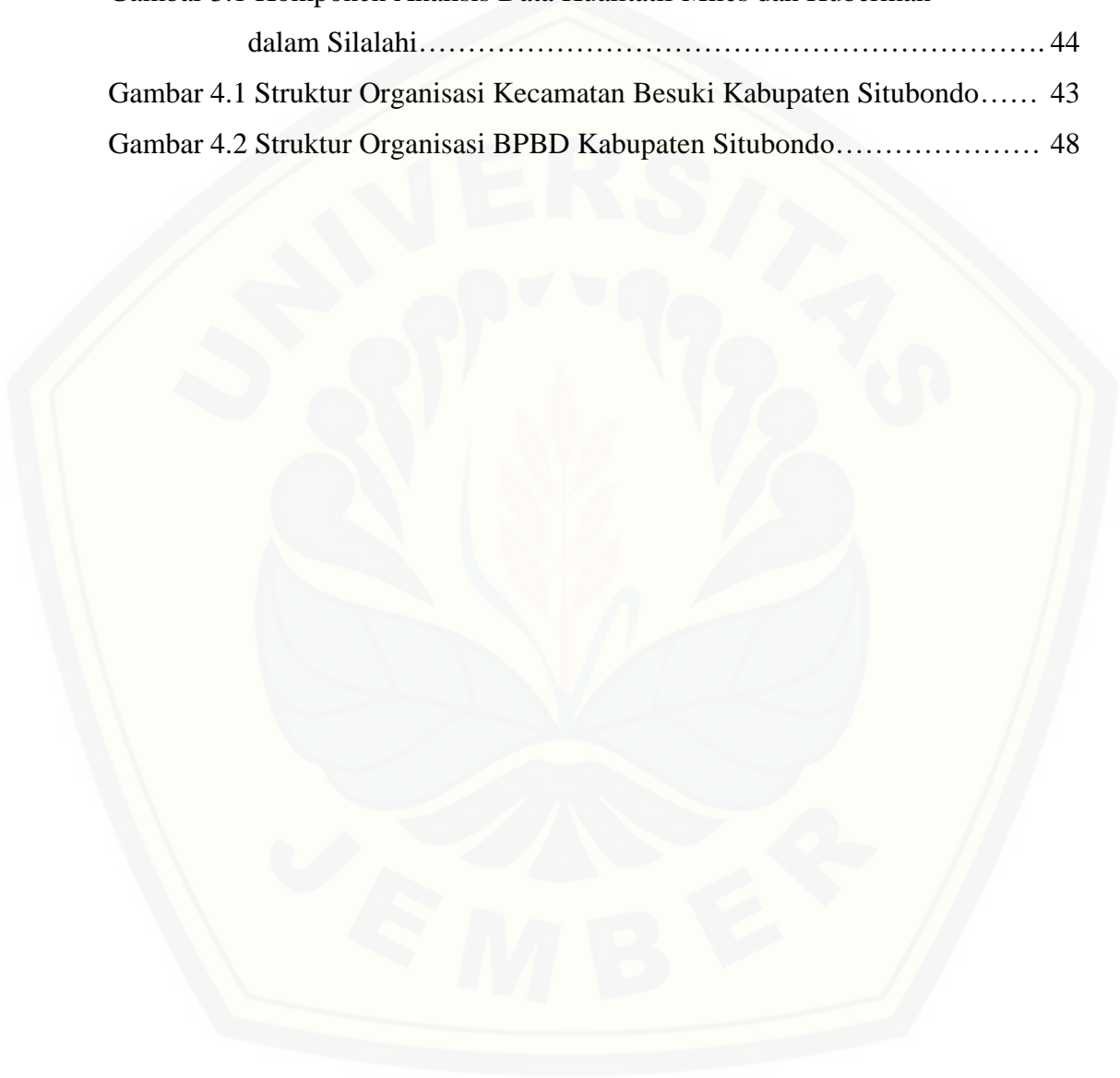
4.2.1 Struktur Organisasi	
46	
4.2.2 Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Situbondo	
51	
4.2.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
52	
4.3 Hasil Penelitian	54
4.3.1 Kecamatan Besuki Rawam Banjir	54
4.3.2 Peran BPBD dalam Penanganan Tahap Pasca-bencana	62
BAB 5.KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar 10 Provinsi yang mengalami kejadian bencana alam	4
Tabel 1.2 Data Kejadian Bencana Banjir Kab. Situbondo 2013-2016	5
Tabel 1.3 Data kerusakan akibat bencana banjir di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2016	6
Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	34
Tabel 4.1 Data Luas wilayah per kecamatan di Kab. Situbondo Tahun 2015-2016	40
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Per Kecamatan Dan Jumlah Kelurahan /Desa Di Kabupaten Situbondo Tahun 2015-2016.....	41
Tabel 4.3 Nama pejabat pemerintahan kaecamatan besuki	43
Tabel 4.4 Data kejadian Bencana Banjir Kab. Situbondo 2013-2016	56
Tabel 4.5 Bentuk Kegiatan pemberian bantuan BPBD Situbondo pada tahap Rehabilitasi	65
Tabel 4.6 Rincian Pekerjaan Persatuan Kerja Kecamatan Besuki 2016 tahap rehabilitasi	67
Tabel 4.7 Pelaksanaan pekerjaan 2015 dalam penggunaan dana APBN pada tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi	68
Tabel 4.8 Bentuk Kegiatan Pemberian Bantuan Tahap Rekonstruksi BPBD Situbondo	72
Tabel 4.9 rincian pekerjaan persatuan kerja Kecamatan Besuki 2016 tahap rekonstruksi	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Manajemen Bencana	22
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi.....	44
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.....	43
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Situbondo.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo
- Lampiran 3 Surat Izin Menyelesaikan Penelitian Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo
- Lampiran 4 Surat Izin Menyelesaikan Penelitian Dari Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
- Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
- Lampiran 5 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Lampiran 6 Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- Lampiran 7 Dokumentasi Observasi dan Wawancara

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki panjang pantai 81.000 km (nomer 2 di dunia). Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan karena terdiri lebih dari 17.508 pulau dan berpenduduk sekitar 237 jiwa. Indonesia dikenal sebagai zamrud khatulistiwa, Indonesia memiliki keindahan dan kekayaan alam yang luar biasa. Namun demikian, masyarakat Indonesia juga harus menyadari bahwa mereka hidup diwilayah yang berisiko terhadap ancaman bencana. Selain berada disekeliling 3 lempeng tektonik utama yang aktif yaitu Eurasia, Pasifik dan Hindia Australia, Indonesia memiliki 127 gunung api aktif atau kemudian dikenal sebagai *ring of fire*. Proses tektonik aktif tersebut menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa bumi, tsunami, gunung meletus dan lainnya. Disamping itu faktor hidrometeorologi juga memicu terjadinya bencana alam lain seperti banjir bandang, longsor, angin puting beliung atau gelombang pasang (Maarif, 2012:120).

Bencana dapat datang secara tiba-tiba, dan mengakibatkan kerugian materil dan moril. Salah satu peran pemerintah dalam mengatasi serta membantu bencana yang adalah dengan menanggulangi dan memulihkan kondisi masyarakat akibat bencana. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Tumbuhnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang upaya mencegah, dan mengurangi bencana yang dapat dipastikan akan tumbuh terus-menerus dalam sekala yang lebih besar. Masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran bersama akan pentingnya sistem penanggulangan bencana yang komprehensif setelah kejadian bencana yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Setelah kejadian bencana tersebut Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 24 Tahun

2007 tentang Penanggulangan Bencana. Untuk merealisasikan Undang-undang tersebut, pada tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Undang-undang No. 24 tahun 2007 pasal 1 secara komprehensif mengidentifikasi bencana sebagai peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 3 faktor: pertama faktor alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dll; kedua faktor non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah; ketiga faktor manusia, yang kemudian disebut sebagai bencana sosial, yang meliputi konflik sosial atau kerusuhan sosial.

Pada tingkat pusat telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sedangkan di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sesuai dengan Permendagri No. 46 tahun 2008 bahwa setiap provinsi diwajibkan membentuk BNPB sedangkan di Kabupaten membentuk BPBD. (Maarif, 2012:95).

Menurut Maarif (2012:82) tentang kebijakan penanganan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada fase pasca bencana, aktivitas utama ditargetkan untuk memulihkan kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat meskipun dengan segala keterbatasan. Anggaran yang disediakan dari pemerintah untuk keperluan aset pribadi atau rumah hanya berupa stimulan atau santunan. Pemerintah tidak mengganti seluruhnya kerusakan yang ditimbulkan pada aset pribadi. Tetapi pemerintah akan membangun kembali fasilitas umum yang rusak dengan prioritas pada infrastruktur yang vital. Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana di lakukan pada setiap tahapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah ‘‘serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi’’.

Menurut Ramli (2010:31) secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi menjadi tiga tahapan (setiap tahap terdiri dari beberapa kegiatan penanggulangan bencana). Adapun tahapan tersebut sebagai berikut.

1. Tahap Pra-Bencana

Tahap Pra-Bencana terdiri atas kegiatan-kegiatan (a) mitigasi bencana (*disaster mitigation*); (b) esiapsiagaan (*preparedness*); dan (c) peringatan dini (*early warning system*)

2. Tahap Saat Bencana

Tahap Saat Bencana mencakup kegiatan tanggap darurat (*emergency response*)

3. Tahap Pasca-Bencana

Pada tahap Pasca-bencana terdiri dari kegiatan-kegiatan yang terdiri atas (a) rehabilitasi (*rehabilitation*) dan (b) rekonstruksi (*reconstruction*).

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang pasca-bencana khususnya rehabilitasi dan rekontruksi. Pengertian rehabilitasi dalam UU No. 24 Tahun 2007 pasal 1 adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-bencana. Rekonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca-bencana.

Indonesia adalah negara yang berada diatas lempeng benua yang masih aktif dengan banyaknya barisan gunung berapi yang masih aktif, sehingga Indonesia seringkali disapa dengan negara yang sangat akrab terjadinya bencana. Berikut adalah tabel kejadian bencana alam dari 10 Provinsi di Indonesia secara nasional.

Tabel 1.1 Daftar 10 Provinsi yang mengalami kejadian bencana alam dalam 3 tahun terakhir (2012-2014)

No	Provinsi	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Kekeringan
1	Aceh	273	1.649	161	1.228	997
2	Sumatera Utara	569	807	92	191	324
3	Jawa Barat	1.578	1.193	150	412	600
4	Jawa Tengah	1.222	1.273	96	129	188
5	Jawa Timur	665	1.218	111	207	139
6	Kalimantan Barat	65	616	17	-	277
7	Kalimantan Selatan	40	623	33	-	249
8	Sulawesi Tengah	205	731	51	158	82
9	Sulawesi Selatan	280	728	58	22	102
10	Sulawesi Tenggara	123	702	20	175	66

Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, data diolah.

Berdasarkan data dari tabel di atas, provinsi yang ada di Pulau Jawa merupakan provinsi yang paling banyak mengalami bencana banjir. Salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang mengalami kejadian bencana banjir dengan peringkat ke 3 se-Indonesia dan menjadi peringkat kedua di Pulau Jawa, yaitu mengalami 1.218 kejadian bencana banjir.

Provinsi Jawa Timur terletak di wilayah timur pulau Jawa. Batas wilayah provinsi Jawa Timur di sebelah utara, provinsi Jawa Timur berbatasan dengan laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali; Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang sangat rawan terjadi bencana. Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan yang sering terjadi bencana. Kawasan rawan bencana provinsi Jawa Timur dikelompokkan dengan kawasan rawan banjir, bencana longsor, gelombang pasang, kebakaran hutan serta angin kencang dan puting beliung. Untukantisipasi dampak bencana perlu upaya-upaya antara lain deteksi dini bencana, melestarikan kawasan lindung dan penanggulangan bencana. Daerah rawan bencana banjir dan kekeringan di Jawa Timur berada pada di sepanjang pantai utara dan pantai selatan Jawa diantaranya Situbondo,

Probolinggo, Jember, Lumajang, Surabaya, Gersik, Lamongan dan Tuban. Daerah rawan bencana gunung berapi yang termasuk aktif di antaranya Gunung Semeru (Lumajang), Gunung Kelud (Kediri), Gunung Arjuno dan Welirang (Malang), Gunung Bromo (Prolinggo), Gunung Raung (Bondowoso, Jember, Banyuwangi), Gunung Ijen (Banyuwangi), Gunung Lamongan.

<http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/BAB-2.1-Gambaran-Umum.pdf>

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang merupakan daerah rawan banjir adalah Kabupaten Situbondo. Terkait daerah yang rawan bencana banjir di Kabupaten Situbondo, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki dampak kejadian bencana yang paling parah khususnya bencana banjir. Berdasarkan data dari Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Kabupaten Situbondo pada tahun 2013-2016, Kecamatan Besuki merupakan kecamatan yang memiliki dampak kejadian bencana banjir paling tinggi. Berikut ini adalah data kejadian bencana banjir di beberapa Kecamatan di Kabupaten Situbondo.

Tabel 1.2 Data kejadian Bencana Banjir Kab. Situbondo 2013-2016

No	Kecamatan	Bencana Banjir				Total
		2013	2014	2015	2016	
1	Kec Besuki	45	2	4	5	56
2	Kec Panarukan	9	11	4	1	25
3	Kec Kendit	4	17	1	4	26
4	Kec Bungatan	8	5	-	3	16
5	Kec Mlandingan	19	-	-	1	20
6	Kec Sumber Malang	3	-	-	1	4
7	Kec Jatibanteng	1	-	-	-	1
8	Kec Suboh	4	-	-	-	4
9	Kec Kendit	1	-	-	-	1
10	Kec Jangkar	1	-	1	-	2
11	Kec Panji	1	2	-	-	3
12	Kec Banyuputih	6	-	3	-	9
13	Kec Banyuglugur	1	-	-	-	1

Sumber: Data Pusdalops BPBD kejadian bencana banjir tahun 2013-2016, diolah.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan bahwa jumlah kecamatan yang berada di Kabupaten Situbondo yang mengalami bencana banjir berjumlah 13 kecamatan. Menurut data Pusdalops BPBD Kabupaten Situbondo kejadian bencana banjir tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa Kecamatan Mlandingan menduduki urutan ke 4 daerah yg mengalami bencana banjir paling tinggi dengan

total kejadian sebanyak 20 kejadian, Kecamatan Panarukan menduduki urutan ke 3 daerah yang mengalami bencana banjir paling tinggi dengan total kejadian sebanyak 25 kejadian, Disusul dengan Kecamatan Kendit menduduki peringkat ke 2 daerah yang mengalami bencana banjir paling tinggi dengan total kejadian sebanyak 26 kejadian, dan yang terakhir Kecamatan Besuki yang menduduki urutan pertama daerah yang mengalami kejadian bencana banjir paling tinggi dengan total kejadian sebanyak 56 kejadian di Kabupaten Situbondo. Selain bencana banjir Kabupaten Situbondo juga rawan terjadi bencana seperti bencana longsor, puting beliung, dan kekeringan.

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Situbondo menyebabkan beberapa kerusakan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Data kerusakan akibat bencana banjir di Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2016

No	Kecamatan	Rusak ringan	Rusak berat	Rusak total	Jumlah Total Kerusakan
1	Banyuglugur	58	-	-	58
2	Banyuputih	120	18	-	138
3	Besuki	4135	20	-	4167
4	Bungatan	1534	-	-	1534
5	Jangkar	85	-	-	85
6	Jatibanteng	42	-	-	42
7	Kendit	726	-	-	726
8	Mlandingan	-	20	-	20
9	Panarukan	2000	-	-	2000
10	Panji	54	-	-	54
11	Suboh	364	-	-	364
12	Sumbermalang	-	4	-	4

Sumber: Data Pusdalops BPBD Kerusakan Bencana Banjir Tahun 2013-2016, diolah.

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, kerusakan yang disebabkan oleh bencana banjir di Kabupaten Situbondo yang paling rendah adalah Kecamatan Sumbermalang, yang ke 2 adalah Kecamatan Mlandingan, yang ke 3 adalah Kecamatan Jatibanteng, yang ke 4 adalah Kecamatan Panji, yang ke 5 adalah Kecamatan Banyuglugur, yang ke 6 Kecamatan Jangkar, yang ke 7 adalah Kecamatan Banyuputih, yang ke 8 adalah Kecamatan Suboh, yang ke 9 adalah Kecamatan Bungatan, yang ke 10 adalah Kecamatan Panarukan, dan yang terakhir

adalah Kecamatan Besuki yang mengalami paling banyak kerusakan dengan jumlah total kerusakan sebesar 4167 kerusakan. Berdasarkan dari jumlah total kerusakan yang dialami Kecamatan Besuki yang disebabkan oleh bencana banjir, kejadian tersebut menimbulkan suatu permasalahan yang signifikan yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Besuki. Oleh karena itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca-bencana khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi sangat penting adanya, sebagaimana dimaksud dalam UU No.24 tahun 2007 Pasal 33.

Peneliti ingin meneliti tentang penanggulangan bencana banjir pada tahap pasca-bencana yaitu tentang rehabilitasi dan rekonstruksi yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, berdasarkan pada data pada tabel 1.4 menunjukkan Kecamatan Besuki memiliki kerusakan akibat terjadinya bencana dengan jumlah kerusakan yang paling banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Pasca Bencana dipilih karena data kerusakan di Kecamatan Besuki yang ditimbulkan oleh bencana banjir dengan mengalami lebih banyak di kerusakan dan tujuan pasca-bencana yaitu untuk pemulihan dan juga perbaikan dari kebutuhan masyarakat.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 57, rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan, perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan UU No. 24 Tahun 2007 Pasal 58 rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik meliputi, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial,

ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 15 Oktober 2016 peneliti melakukan wawancara kepada beberapa warga desa di Kecamatan Besuki, di antaranya adalah ibu Ayu warga Desa Demung.

“Di daerah ini memang setiap tahun menjadi langganan banjir dek, terutama rumah saya dan tetangga saya ini. Karena posisi rumah warga disini dekat dengan sungai. Saat banjir biasanya airnya sampai melebihi kasur di kamar, pernah juga atap genteng saya roboh, pintu rumah saya rusak. Mmm...dan semenjak terjadinya banjir dari awal sampai sekarang saya tidak pernah mendapat bantuan apapun, yah diperbaiki sendiri dek”. (tanggal 15 oktober 2016 pukul 10.15).

Wawancara ke-2 pada tanggal 15 Oktober 2016 kepada bapak Irwan warga Demung.

“Banjir tiap tahun dek, dagangan saya rusak gara-gara banjir itu dek, bantuan dari pemerintahan tidak pernah ada, ya gimana lagi saya sama tetangga biasanya gotong-royong sendiri buat betulin yang rusak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Besuki terdapat beberapa masalah, di antaranya yaitu bantuan BPBD yang tidak terlaksana di beberapa desa yang menjadi langganan banjir. Dari perbaikan lingkungan daerah, sarana prasarana umum dan perbaikan rumah masyarakat tidak terlaksana dengan baik sehingga tidak sesuai dengan tugas yang ada di dalam UU No. 24 Tahun 2007 pasal 57 bahwa BPBD mempunyai tugas untuk memberi bantuan setelah terjadinya bencana yaitu pada pasca-bencana.

Menurut UU No. 24 tahun 2007 Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD adalah badan yang berada di bawah naungan pemerintah daerah sehingga BPBD juga mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, khususnya di tahap pasca-bencana. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dan evaluasi tentang peran yang

dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Situbondo khususnya BPBD Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi bencana alam.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut sugiyono (2004:32), “masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi” Berdasarkan dari definisi di atas maka rumusan masalah di penelitian ini adalah **Bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pasca-bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?**

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai agar penelitian memiliki arah yang jelas. Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan di capai dalam penelitian ini sebagai upaya yang ditempuh oleh penelitian untuk memecahkan masalah (moleong 2008:400). Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pasca bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukam harus memiliki manfaat kepada lingkungan sekitar, masyarakat dan negara terkait objek dan bahasan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Bagi Dunia Akademisi

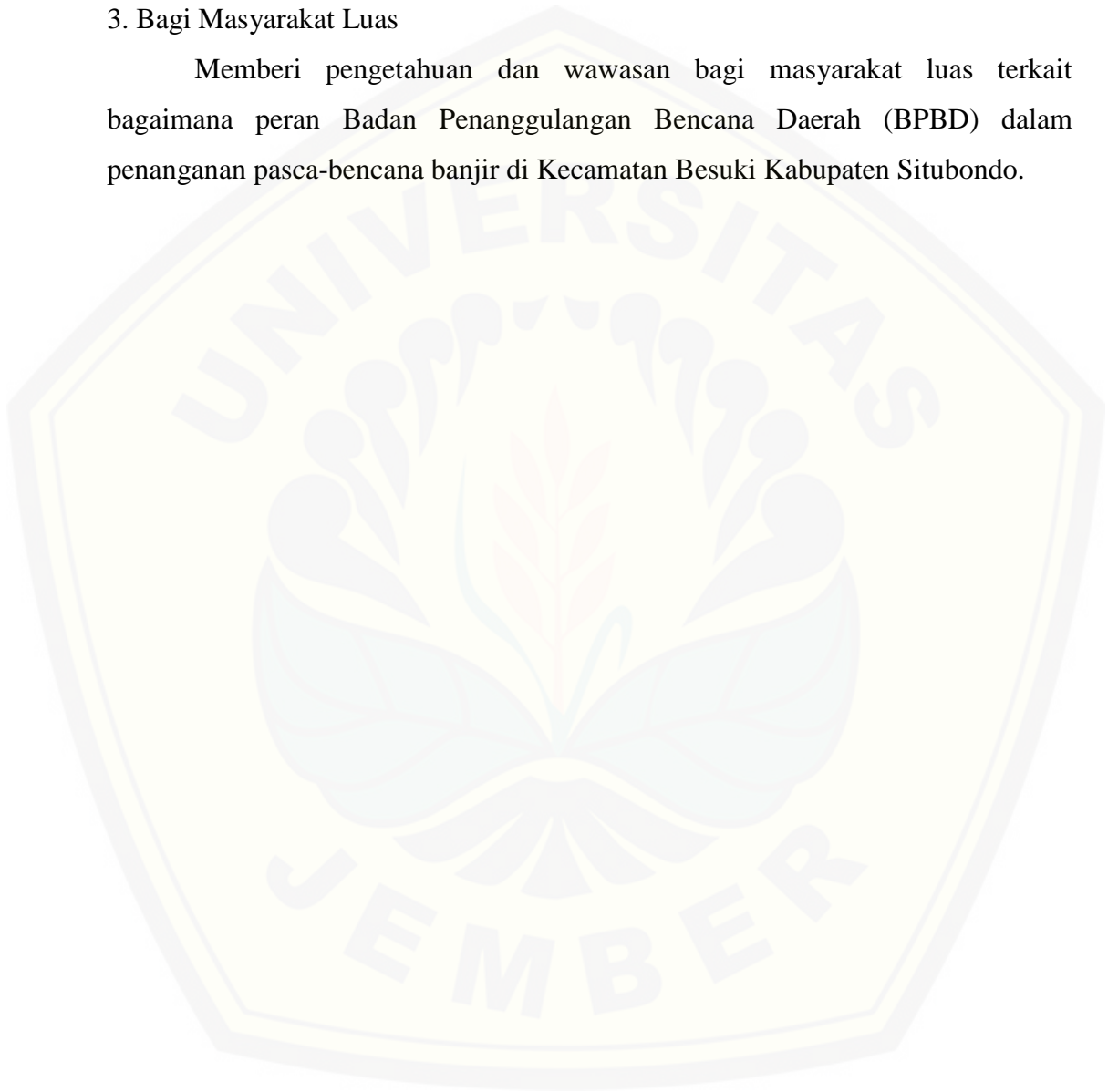
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu refrensi kajian penelitian terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pasca-bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sehingga mampu menambah kognisi bagi pembaca.

2. Bagi Pemerintah

Memberi suatu gambaran terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pasca-bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sehingga dapat dijadikan kritik atau saran bagi pemerintah.

3. Bagi Masyarakat Luas

Memberi pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat luas terkait bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pasca-bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian konsep

Pengertian konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1995:34) konsep yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Sedangkan pengertian konsepsi dasar menurut Suprpto (1986:30) adalah konsepsi dasar adalah suatu pandangan teoritis dan definisi singkat yang mendasari pemikiran kita guna mencari jalan keluar atau suatu pemecah masalah dari persoalan yang kita teliti. Maka sesuai dengan konsepsi yang dibutuhkan bagi penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan demikian tujuan dari konsepsi dasar tersebut adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dan memberlandaskan pokok kerangka berpikir untuk membahas dan mengkaji masalah yang menjadi inti pokok suatu penelitian.

1. Konsep Administrasi Publik
2. Konsep Organisasi
3. Konsep Peran
4. Manajemen Bencana

2.2 Konsep Administrasi Publik

Henry dalam Keban (2004:8) ruang lingkup dari administrasi publik yaitu organisasi publik. Administrasi publik merupakan wadah yang digunakan pemerintah yang di dalamnya ada sekelompok orang yang melakukan tugas-tugas dengan tujuan yang sama. Sedangkan manajemen merupakan sistem pengolahan dari tujuan organisasi tersebut agar efektif dan efisien. Secara fokus kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik.

Menurut Thoha (2005:25) lokus dan fokus suatu disiplin ilmu, paradigma administrasi publik dibagi menjadi:

- a. Paradigma 1 dikenal sebagai paradigma dikotomi politik dan administrasi. Menurut Frank J. Goodnow dalam bukunya yang berjudul *politics and administration* berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintahan.

Fungsi tersebut adalah politik administrasi. Politik menurut Goodnow harus melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan-keinginan negara. Sedangkan administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan tersebut. Lokus pada paradigma 1 yakni memepermasalahkan dimana seharusnya administrasi berada. Menurut Goodnow administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Sedangkan badan legislatif dan yudikatif fungsi pokok dan tanggungjawabnya tetap menyampaikan keinginan-keinginan negara.

- b. Paradigma II (1927-1937) disebut sebagai paradigma prinsip-prinsip administrasi. pada fase ini pengembangan pengetahuan manajemen memberikan pengaruh yang besar terhadap timbulnya prinsip-prinsip administrasi publik. Menurut Gulick dan Urwick prinsip-prinsip administrasi disingkat POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Lokus pada paradigma ini berada pada esensi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip administrasi publik yang dimaksud adanya suatu kenyataan bahwa administrasi publik biasa terjadi pada semua tataran administrasi tanpa memperdulikan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi atau kerangka institusi, hal yang biasa diterapkan dan diikuti dibidang apapun tanpa terkecuali.
- c. Paradigma III (1956-1970) disebut sebagai paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Lokus pada paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan. Prinsip-prinsip tersebut tidak member jalan keluar tentang fokus yang dapat digunakan dalam administrasi publik. Sehingga pada masa ini administrasi publik mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap sebagai disiplin yang paling dominan dalam dunia administrasi publik.
- d. Paradigma IV (1956-1970) administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Fokus pada paradigma ini adalah prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya sedangkan lokusnya tidak jelas. Dua arah

perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh disiplin ilmu psikologisosial serta berorientasi pada kebijakan publik.

- e. Paradigma V (1970) administrasi publik sebagai administrasi publik. Tahap ini fokus administrasi bukan semata-mata pada ilmu murni administrasi melainkan pada teori organisasi. Setengah dekade terakhir perhatian pada teori organisasi ditujukan pada bagaimana dan mengapa organisasi tersebut bekerja, dan bagaimana orang-orang berperilaku dalam organisasi serta bagaimana dan mengapa keputusan-keputusan itu diambil. Selain itu, pertimbangan-pertimbangan untuk menggunakan teknik-teknik ilmu manajemen ke dalam lingkungan pemerintahan menjadi perhatian pada fase ini. Lokus pada paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat.

Berdasarkan tentang paradigma administrasi publik, pada penelitian ini paradigma yang digunakan adalah paradigma yang ke 5 yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah peran pasca bencana BPBD Kabupaten Situbondo dengan lokusnya adalah penanganan bencana alam banjir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

2.3 Konsep Organisasi

Secara konseptual, pengertian organisasi tersedia banyak definisi. Salah satu definisi yang sangat komprehensif untuk mendeskripsikan pengertian organisasi adalah Chester I Bernard dalam Thoha (2005:128) menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerja sama antara satu orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi, sebagian mengenai hal dan mengenai hubungan-hubungan, di tinjau pada sejumlah rumusan teoritis organisasi, maka dapat diambil kesimpulan dimana organisasi secara umum dimaknai sebagai wadah serta proses kerja sama sejumlah manusia yang terikat secara dalam hubungan formal dalam rangka hierarki untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Unsur-unsur yang melekat dalam suatu organisasi meliputi: (1) adanya dua orang atau lebih sebagai proses interaksi, (2) adanya maksud untuk kerja sama

sejumlah manusia yang terikat dalam hubungan formal, (3) adanya pengaturan hubungan yang dalam organisasi diwujudkan dengan adanya rangkaian hirarki, yaitu hubungan bahwa dalam suatu organisasi terdapat atasan dan bawahan dan sifat hubungan tersebut adalah dinamis, dalam arti manusia-manusia yang menduduki jabatan-jabatan tersebut bias berganti-ganti pada setiap saat diperbaiki, (4) adanya tujuan yang hendak dicapai sehingga organisasi bukanlah tujuan, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan tugas pokok.

2.3.1 Prinsip dan Asas Organisasi

Organisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: pertama struktur, merupakan suatu cetak biru organisasi yang menunjukkan bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama. Struktur ini meliputi desain pekerjaan (mengacu pada proses yang digunakan pada pimpinan organisasi merinci isi, metode dan hubungan setiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan individu), dan desain organisasi (menunjukkan dalam struktur organisasi). Faktor yang kedua adalah proses, merupakan aktivitas yang memberikan nafas kehidupan bagi organisasi. Dalam kategori umum, proses meliputi komunikasi (menghubungkan organisasi dengan lingkungan, termasuk bagiannya), evaluasi prestasi kerja (dilakukan oleh pimpinan organisasi kepada prestasi individu dan kelompok dalam organisasi), pengambilan keputusan (tergantung pendefinisian yang tepat dan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut), sosialisasi (proses penyadaran individu atas tujuan organisasi), dan pengembangan karier (individu memasuki organisasi untuk tujuan dan karier pribadi mereka).

Henri dalam Thoha (2005:148) menyatakan bahwa *Aliran Prinsip Universal* adalah suatu organisasi itu diatur berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Adanya pembagian kerja.
2. Adanya otoritas dan tanggung jawab.
3. Adanya disiplin.
4. Adanya kesatuan komando.
5. Adanya kesatuan pengarahan.

6. Adanya sitem penggajian.
7. Adanya sentralisasi.
8. Adanya jenjang pengawasan.

2.3.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana di bagian daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD dibentuk baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti juga BNPB di tingkat pusat, di daerah BPBD bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) dan penanganan pengungsi serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan PB. Badan penanggulan bencana daerah adalah lembaga pemerintah no departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.

Terkait dengan Landasan Hukum Penanggulangan Bencana, pemerintah telah menetapkan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo
9. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo

Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebagai perumusan dan penetapan kebijakan penanggulan bencana dan penangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. BPBD di harapkan mampu menangani bencana alam di daerah terdampak bencana, baik sebelum bencana, saat bencana dan setelah terjadi bencana. Sehingga BPBD harus mampu melakukan penanganan bencana alam secara tepat, cepat, efektif dan efisien dengan cara melakukan penanganan pasca bencana melalui kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi. Peran aktif masyarakat juga diharapkan sangat perlu untuk membantu atau mendukung upaya penanganan pasca bencana tersebut. Upaya-upaya BPBD tersebut dimungkinkan dapat membantu atau meringankan beban warga setelah terjadinya bencana.

2.4 Konsep Peran

2.4.1 Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2012:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Soekanto juga menyatakan bahwa tidak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peran. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa peranan merupakan fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi

dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat menjalankan fungsinya karena posisinya dimilikinya tersebut.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Stephen Robbins (2002:165) menyatakan peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu satuan sosial. Pemahaman perilaku peran secara dramatis akan disederhanakan jika masing-masing dari kita memilih satu peran dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Sayang, jika dituntut memainkan peran yang beraneka, baik pada pekerjaan maupun diluar pekerjaan. Seperti kita saksikan, salah satu tugas dalam memahami perilaku adalah memahami peran yang sedang dimainkan seseorang.

Horton (1999:118) peran diartikan sebagai perilaku yang diharapkan orang lain dari seseorang dalam suatu status tertentu. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu peristiwa sebagai tugas yang telah diberikan sesuai dengan kedudukan masing-masing. Disini peneliti membahas tentang peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo.

2.4.2 Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dari sini dapat dilihat bahwa peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 dijelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana” dan pasal 6 menyatakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 7 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ialah:

(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah.

- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak- pihak internasional lain.
 - e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
 - f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.
 - g. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.
- (2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi.
- a. Jumlah korban.
 - b. Kerugian harta benda.
 - c. Kerusakan prasarana dan sarana.
 - d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana.
 - e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam UU No. 24 Tahun 2007 dalam penyelegaraan penanggulangan bencana adalah:

Tugas

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.

6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan prundang-undangan.

2.5 Manajemen Bencana

2.5.1 Bencana

Negara Indonesia adalah negara yang sangat rawan terjadi bencana salah satunya di wilayah Kabupaten Situbondo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana tertulis bahwa:

“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

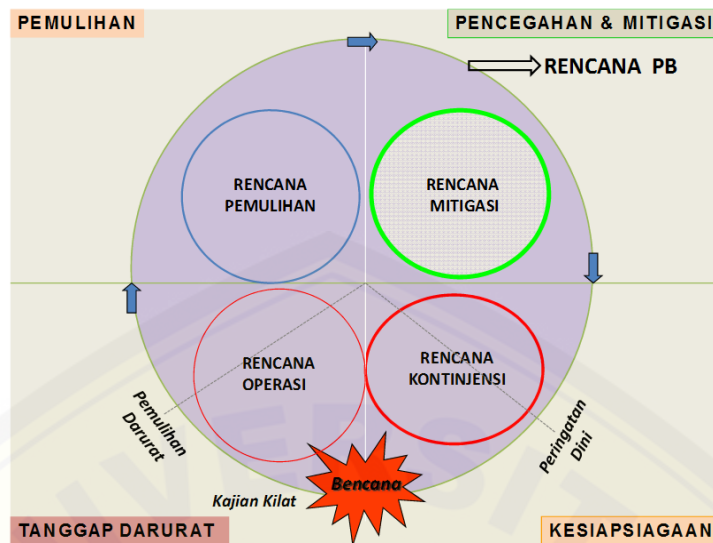
Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis sebagai berikut.

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Banjir merupakan aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke dalam kanan dan kiri serta jumlah yang melebihi dan menimbulkan genangan atau aliran sehingga mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam dua bentuk, berupa penggenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan banjir sebagai akibat terjadinya limpasan air dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengalirannya (Siswoko, 1985:17). Banjir disuatu tempat dengan kondisi tertentu bukan merupakan masalah bahkan bermanfaat bagi kehidupan, misalnya untuk sarana penggelontoran kayu. Banjir dapat disebabkan oleh dua jenis; yaitu: 1). Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi, dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya; 2). Faktor manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. Kedua faktor tersebut dapat terjadi bersama-sama yang dapat membuat banjir menjadi sangat merugikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 siklus manajemen bencana

Sumber: BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir.
2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (*single hazard*) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*).
3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (*Operational Plan*) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk

mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme penanggulangan pasca-bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: rehabilitasi dan rekonstruksi

2.5.2 Pasca-Bencana

Pada fase pasca-bencana, aktivitas utama ditargetkan untuk memulihkan kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik (*build back better*) meskipun segala keterbatasan. Anggaran yang disediakan dari pemerintah untuk keperluan aset pribadi atau rumah hanya berupa stimulan atau santunan. Pemerintah tidak mengganti seluruhnya kerusakan yang ditimbulkan pada aset pribadi. Tetapi pemerintah akan membangun kembali fasilitas umum yang rusak dengan prioritas pada infrastruktur yang vital. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca-bencana meliputi.

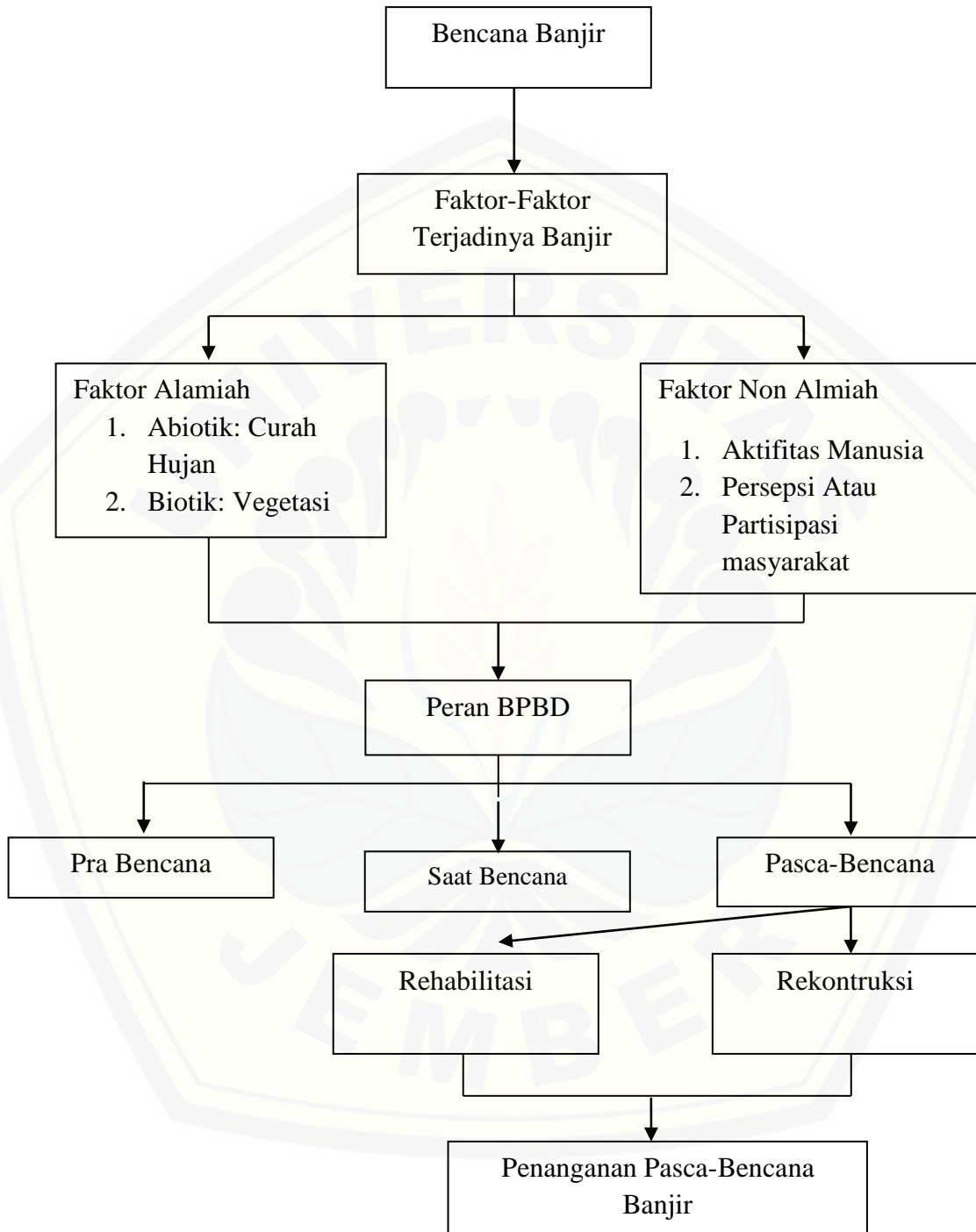
1. Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca-bencana.

2. Rekonstruksi.

Rekonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca-bencana.

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Definisi metode penelitian menurut Juliansyah Noor (2011:254) adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Misalnya, peneliti mengajukan asumsi bahwa sikap seseorang dapat diukur dengan menggunakan skala sikap, dalam hal ini, ia tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikan itu, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang di perolehnya, asumsi dapat bersifat substansif atau metodologis. Selanjutnya menurut buku pedoman penulis karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:22) metode penelitian adalah aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan peneliti. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan di dalam penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan devinisi di atas dapat disimpulkan secara singkat metode penelitian yaitu metode untuk menjawab atau merumuskan suatu masalah-masalah pada penelitian. Metode penelitian ini akan dijelaskan langkah-langkah metode penelitian sebagai berikut.

- 1 Pendekatan penelitian
- 2 Tempat dan waktu
- 3 Situasi sosial
- 4 Desain penelitian atau rancangan penelitian kualitatif
- 5 Teknik dan alat perolehan data
- 6 Teknik pengujian keabsahan data
- 7 Teknik penyajian data

3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan masalah penelitian yang diambil oleh peneliti untuk mengetahui masalah yang ada yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Didalam buku Juliansyah Noor Cresweel (2014:34) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden. Dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Menurut bogdan dan taylor (1975:5) didalam buku moleong (2012:4) pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung dari pengamatan dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Juliansyah Noor (2014:35) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Selanjutnya, menurut Bungin (2008:36) penelitian deskriptif menggambarkan mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian yang terjadi.

Berdasarkan pengertian tentang teori penelitian yang terdapat diatas, didalam penelitian ini berupaya memberikan gambaran dan uraian secara jelas dengan menggunakan metode kualitatif yang akan di deskriptifkan dengan menghasilkan kata-kata yang diperoleh dari narasumber yang dibutuhkan yang menunjang penelitian tentang Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dalam Penanganan Pasca-Bencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo berdasarkan fakta yang terjadi dan juga pengamatan di lapangan.

3.2 Tempat dan Waktu

Tempat dan waktu penelitian adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan sangat mempengaruhi hasil penelitian walaupun penelitian tersebut termasuk dalam kategori fokus yang sama. Menurut pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan tempat daerah penelitian yaitu di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Belum ada penelitian di Kecamatan Besuki yang mengkaji terkait peran BPBD dalam penangan pasca bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- b. Kecamatan Besuki merupakan salah satu kecamatan yang sering terjadi bencana banjir setiap tahunnya, akibat terjadinya banjir otomatis daerah Besuki mengalami kerusakan yang tidak sedikit dan pastinya merugikan warga. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran BPBD dalam penanganan pasca bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2017 sampai data yang dibutuhkan telah tercapai dan selesai, guna memberikan gambaran terkait peran BPBD dalam penanganan pasca bencana banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

3.3 Situasi Sosial

Menurut pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2016:52) situasi sosial terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Informan kunci atau subyek penelitian adalah orang yang memberikan informasi, menguasai,

memahami obyek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti.

Menurut pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:23) tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu penelitian tersebut dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menentukan tempat daerah penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut.

1. Menurut data terjadinya bencana di Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dari tahun 2013-2014, dimana kecamatan yang paling tinggi terkena bencana banjir adalah Kecamatan Besuki.
2. Kecamatan besuki juga menjadi salah satu kecamatan yang mempunyai kerusakan paling tinggi diantara kecamatan yang lain, hal tersebut yang menjadi dasar bahwa peneliti ingin meneliti peran pemerintah dalam penanganan pasca-bencana banjir di kecamatan besuki Kabupaten Situbondo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017 sampai data yang dibutuhkan telah tercapai dan selesai.

Menurut buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah (2016:53) informen adalah orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang teliti. Dapat di simpulkan bahwa Informen adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya, karena orang tersebut dianggap memiliki pengetahuan tentang data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah purposive sampling. Menurut Sugiono (2011:85) merupakan teknik penentuan sampel yang didasari atas pertimbangan tertentu. Menurut Sugiono ada beberapa kriteria informan yaitu sebagai berikut.

- a. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti oleh proses enkulturasi yaitu proses penghayatan bukan sekedar proses mengetahui.
- b. Orang yang mempunyai waktu untuk dimitai informasi.
- c. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.

- d. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektifitasnya.
- e. Orang yang masih baru kenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya nara sumber atau guru dalam penelitiannya.

Aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Melihat peran aktif BPBD dalam melakukakn tugas dalam penanganan pasca bencana di kecamatan besuki.
2. Melihat peran aktif masyarakat Kecamatan Besuki dalam membantu BPBD merealisasikan tugas yang akan berdampak positif terhadap masyarakat sendiri.
3. Melihat respon masyarakat Kecamatan Besuki dalam kegiatan yang dilakukan BPBD dalam membantu masyarakat setelah terjadinya bencana banjir.
4. Melihat hasil nyata dalam tugas BPBD terhadap masyarakat Besuki yang telah terkena bencana banjir.

3.4 Desain Penelitian Atau Rancangan Penelitian Kualitatif

Menurut buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2016:53) subbagian ini menetapkan peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

3.4.1 Menjelaskan Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan pasca-bencana di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

3.4.2 Memilih Informen Sebagai Sumber Data

Informen adalah orang-orang tertentu yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti di dalam proses penelitiannya, karena orang tersebut dianggap memilik pengetahuan tentang data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian

tersebut. Maka peneliti akan mewawancarai informan yang terpilih melalui teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan bahwa informan merupakan aktor-aktor yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Informan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c. Anggota Satuan Tugas Pusat Pengendali Operasi "SATGAS PUSDALOPS" Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo.
- d. Masyarakat di masing-masing desa di Kecamatan Besuki.

3.4.3 Melakukan pengumpulan data

1. Peneliti melakukan pengumpulan data bencana dari kantor BPBD dan dari Undang-Undang.
2. Peneliti melakukan observasi awal ke kecamatan besuki untuk melihat peristiwa dan permasalahan yang terjadi dilapang.
3. Peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat dan masyarakat di beberapa desa yang terkena bencana banjir yang berada di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, tentang peran yang dilakukan BPBD setelah terjadinya bencana banjir.

3.4.4 Analisis data

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat di Kecamatan Besuki peneliti mendapatkan hasil dari lapang yaitu tentang peran BPBD terhadap masyarakat dan peneliti akan menganalisis hasil wawancara yang di dapatkan dari informan yaitu dari pihak kepala desa dari Kecamatan Besuki, warga sekitar, pihak PBB, dan orang-orang yang terlibat yang mempunyai peran aktif di dalamnya.

3.4.5 Menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya

Setelah data dianalisis maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan tentang peran BPBD dalam penanganan pasca-bencana banjir di Kecamatan Besuki di Kabupaten

Situbondo dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum kepada pihak pemerintah maupun warga sekitar tentang peran yang dilakukan BPBD terhadap masyarakat Kecamatan Besuki.

3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Data yang lengkap dan valid berfungsi sebagai sumber informasi mengenai teori maupun objek dan bahasan penelitian yang disajikan, dianalisis dan diuji keabsahannya sehingga mampu menjawab masalah-masalah peneliti. Menurut pedoman penulisan karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:23) data adalah himpunan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka maupun deskripsi yang berasal dari sumber data. Menurut Bungin (2015:129) sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian, kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Menurut Sugiono (2011:233) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data penelitian dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, tes atau pengukuran. Sedangkan alat perolehan data berbeda-beda sesuai pada macam penelitian dan jenis serta bentuk data yang dicari, seperti alat perekam, kuesioner, alat ukur, proses dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut.

3.5.1 Observasi

Menurut Burn dalam Basrowi dan Suwandi (2008:93) observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Dengan teknik observasi ini peneliti akan mengamati apa yang terjadi dilokasi penelitian, mengamati proses-proses dan peristiwa yang terjadi dan mempelajari data atau dokumen yang dimiliki oleh lembaga terkait. Menurut Usman dan Akbar (2003:54) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Sedangkan menurut Faisal (1990) sebagaimana yang dikutip dalam

Sugiono (2011:226) observasi diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu observasi partisipatif, observasi terang terangan dan tersamar. Pada jenis penelitian ini, peneliti dari awal berterus terang kepada sumber data terkait maksud dan tujuannya dalam rangka penelitian. Alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses observasi ini adalah kamera untuk mendokumentasikan hasil observasi.

3.5.2 Wawancara

Menurut Usman dan Akbar (2003:57) wawancara merupakan proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:18) wawancara dibagi menjadi.

1. Wawancara oleh tim atau panel.
2. Wawancara tertutup dan wawancara terbuka.
3. Wawancara riwayat secara lisan.
4. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Sedangkan menurut Esterberg (2002) yang dikutip oleh sugiono (2011:223) mengklasifikasikan wawancara dalam tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak struktur. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis wawancara semistruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semistruktur proses tanya jawab peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diharapkan peneliti akan memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini. menurut Usman dan Akbar (2003:73) mendefinisikan dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moleong (2004:217) adalah untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2004:217) menyebutkan

bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

1. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
2. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
3. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.

Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut.

1. Dokumen Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo tentang data kejadian bencana banjir, kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir.
2. Dokumen Kecamatan Besuki 2016
3. Dokumen Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data.

Teknik menguji keabsahan data merupakan hal yang sangat penting karena hasil penelitiannya dipercaya atau tidaknya berada pada tahap ini. menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Hal ini karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2004:320) bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan menjadi sebuah bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai teknik pemeriksaan keabsahan yang harus dipelajari oleh peneliti dalam membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas(Derajat Kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikutsertaan
	2. Ketekunan Pengamatan
	3. Triangulasi
	4. Pengecekan Sejawat
Kepastian	5. Kecukupan Referensial
Kebergantungan	6. Kajian Kasus Negatif
Kepastian	7. Pengecekan Anggota
	8. Uraian Rinci
	9. Audit Kebergantungan
	10. Audit Kepastian

Sumber: Moleang (2004:327)

Berdasarkan teknik-teknik keabsahan data diatas, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut.

3.6.1 Perpanjangan Keikutsertakan

Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

Perpanjangan keikut-sertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi:

1. Membatasi gangguan dari dampak penelitian pada konteks,
2. Membatasi kekeliruan (*biases*) peneliti,
3. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

3.6.2 Ketekunan Pengamatan

Seorang peneliti dituntut tekun dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga peneliti dapat menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh sekaligus analisisnya. Oleh karena itu, seorang peneliti menurut Moleong (2004:330) seharusnya mengadakan pengamatan secara teliti, rinci, dan berkesinambungan terhadap factor-faktor yang menonjol yang kemudian dianalisis secara rinci sehingga hasilnya dapat dipahami.

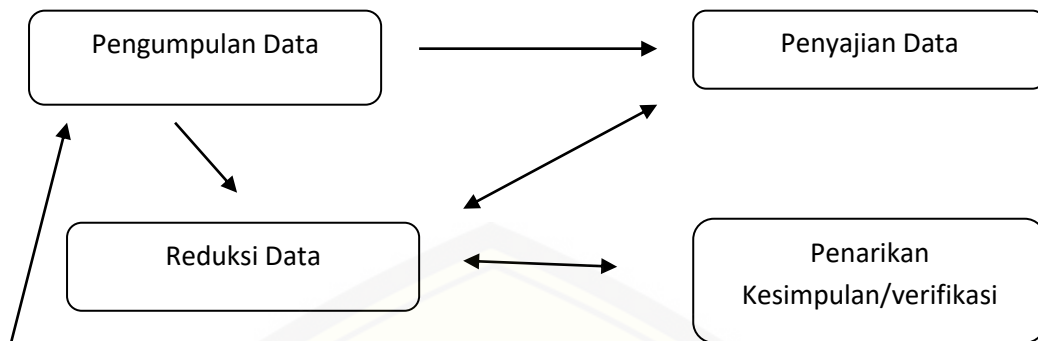
3.6.3 Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cacara sebagai berikut.

1. mengajukan berbagai cara variasi pertanyaan.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

3.7 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Teknik penyajian data dan analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam tahap proses penelitian. Menurut buku pedoman karya tulis ilmiah Universitas Jember (2012:24) teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data awal atau data mentah menjadi informasi dan uraian tentang cara analisisnya. Menurut Bogan yang dikutip Sugiono (2005:88) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat di informankan kepada orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2012:247) menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh yang telah terkumpulkan dari beberapa sumber.



**Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Kualitatif
Miles dan Huberman dalam Silalahi**

Sumber: Komponen Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340)

Gambar 3.1 diatas memberikan sebuah gambaran terkait analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Silalahi (2012:340) menyangkut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu kegiatan dalam siklus analisis data kualitatif yang dilakukan secara terus-menerus dari proses pengumpulan data hingga setelah selesai pengumpulan data atau sampai laporan akhir penelitian telah tersusun lengkap. Menurut Silalahi (2012:340) reduksi data adalah bentuk analisis data dengan cara menyederhanakan, mengabstraksikan, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atas data yang direduksi tersebut.

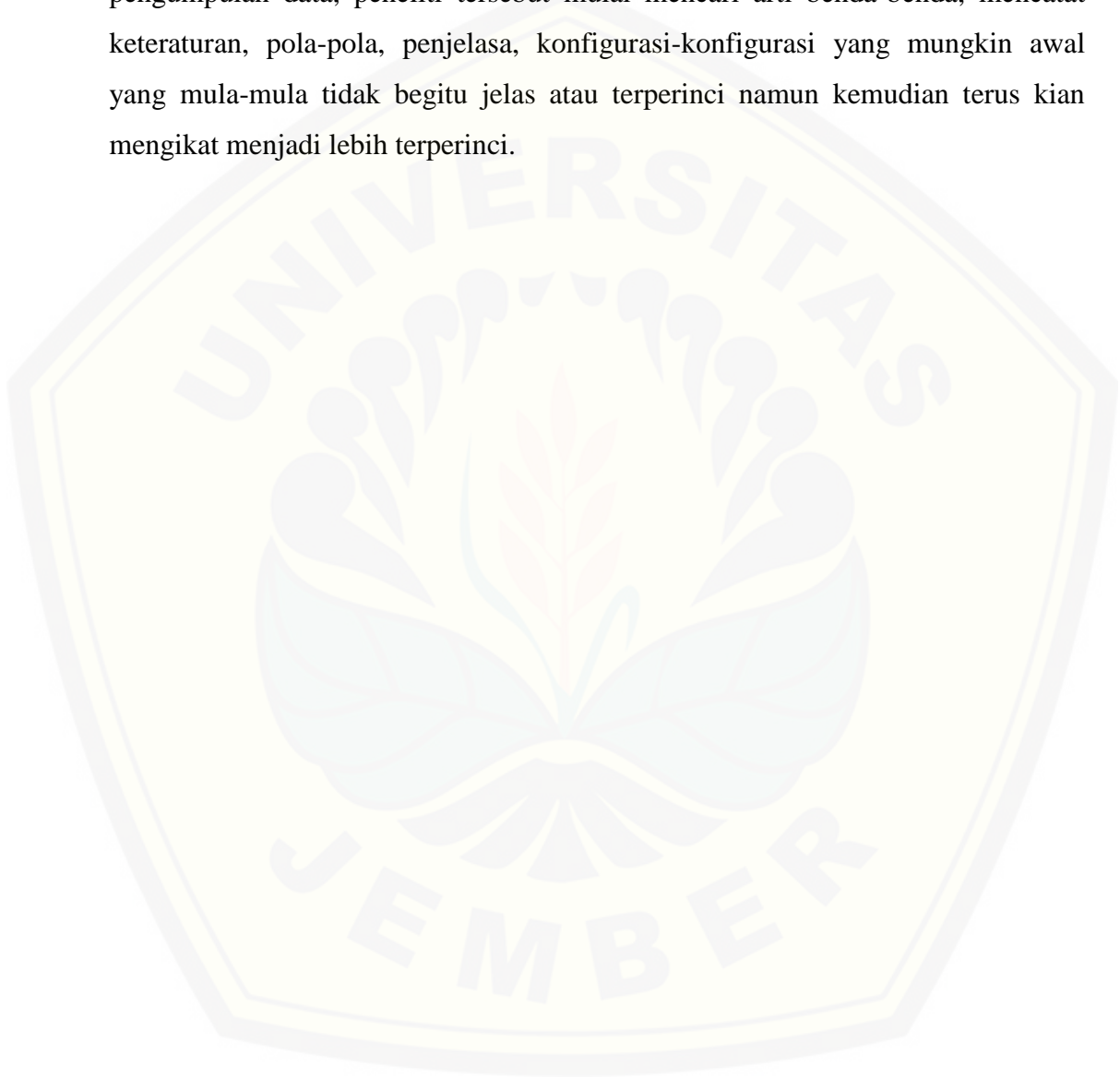
3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data menurut Silalahi (2012:340) merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang ditempuh untuk memahami data yang disajikan sehingga peneliti dapat mengambil tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian data tersebut dilakukan untuk mempermudah penelitidalam memahami esensi atau

abstraksi dari data yang diperoleh sehingga peneliti dapat melakukan tindakan atau melakukan penarikan kesimpulan atas data yang disajikan tersebut.

3.7.3 Verifikasi Data (penarikan kesimpulan)

Menurut Silalahi (2012:341) pada saat peneliti melakukan proses pengumpulan data, peneliti tersebut mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasa, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin awal yang mula-mula tidak begitu jelas atau terperinci namun kemudian terus kian mengikat menjadi lebih terperinci.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut.

a. Tahap Rehabilitasi

Berdasarkan hasil pada tahap rehabilitasi dapat disimpulkan bahwa dalam 10 jenis tugas yang tertuang pada Undang-undang No 24 tahun 2007 BPBD hanya melakukan 1 jenis kegiatan yaitu perbaikan sarana prasarana pada tahap perbaikan jalan raya utama di Kecamatan Besuki yang menghubungkan Desa Besuki dengan beberapa desa yang berada di kecamatan besuki.

b. Tahap Rekonstruksi

Berdasarkan hasil tahap rekonstruksi dapat disimpulkan bahwa dalam 8 jenis tugas yang tertuang pada Undang-undang No 24 tahun 2007, BPBD hanya melakukan 3 jenis tugas pada tahap rekostruksi diantaranya sebagai berikut.

1. Pembangunan kembali sarana prasarana yaitu dengan Pembangunan pelengsengan dipinggiran sungai Desa Besuki, Desa Bloro, Desa Demung dan Desa Widoropayung.
2. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana yaitu dengan rapat internal dalam merancang plengsengan sungai yang kuat.
3. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan msyarakat yaitu dengan bekerja sama dengan Dinas PUPR dalam pembangunan plengsengan.

Berdasarkan hasil dari penelitian peran BPBD Kabupaten Situbondo dalam penanganan pasca-bencana di Kecamatan Besuki dapat disimpulkan bahwa tidak semua tugas yang tertuang di Undang-undang No 24 tahun 2007 pada tahap pasca-bencana dilakukan oleh BPBD.

5.2 Saran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal ini agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanggulangan bencana.

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebaiknya mengatur pengalokasian dana yang diperoleh dengan maksimal sesuai tugas yang dimiliki oleh BPBD agar warga yang telah mengalami bencana terbantu dengan maksimal dan mensosialisasikan kegiatan bantuan yang diberikan dan proses dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang telah mengalami bencana banjir agar masyarakat tahu bahwa pemerintah daerah berperan terhadap bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang mengalami bencana banjir, tidak memandang besar kecilnya bencana.
2. Pemerintah daerah segera mencari solusi bagaimana cara agar air dari sungai tidak naik ke pemukiman warga ketika musim hujan berlangsung. Karena dampak dari meluapnya air sungai merugikan warga dalam segi ekonomi dan juga segi kesehatan, sehingga pemerintah ditidak lagi mengulang pembangun kembali pelengsengan sungai.
3. Pemerintah selalu mengajak masyarakat dalam proses menjaga alam seperti merawat sungai agar tetap bersih dan juga pemerintah selalu mengajak masyarakat dalam ikut serta membangun plengsengan yang bertujuan untuk mencegah meluapnya air sungai ke pemukiman warga.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPBD. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021. BPBD Situbondo. 2016.
- BPBD. 2016. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor. Situbondo. BPBD Situbondo. 2016.
- BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tumbuh, Utuh, Tangguh. BNPB. 2005.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maarif, Syamsul. 2012. *Penanggulangan Bencana Di Indonesia*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Moleong, L. J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Robbin, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rratiwi, N. 2014. *Peran Pemerintah Kabupaten Gresik Dalam Optimalisasi Kemitraan Berbasis CSR*. Jember: Universitas Jember.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Siswoko. 1985. *Pola Pengendalian Banjir pada Sungai*. Jakarta: Dirjen Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2005. *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Undang-undang

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Situbondo.

Internet

Definisi Dan Jenis-Jenis Bencana BPBD Situbondo

<http://bpbd-situbondo.blogspot.co.id/p/definisi-dan-jenis-bencana.html>

(diakses pada tanggal 20 November 2016)

Profil Kabupaten Situbondo

<https://bptsitubondo.wordpress.com/2008/05/11/profil-kabupaten-situbondo-bagian-i/> (diakses pada tanggal 20 November 2016)

Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo

<http://bps.go.id> (diakses pada tanggal 25 september pukul 21.00)

Gambsar Observasi dan Wawancara



Gambar Wawancara dengan Bapak Drs Taufik Hidayat. M. Si selaku kepala BPBD Kabupaten Situbondo



Gambar Wawancara dengan Bapak Husamah Bahres selaku kepala Desa Besuki



Gambar Wawancara dengan Bapak Subrani selaku kepala Desa Bloro



Gambar Wawancara dengan Bapak Harto selaku Bagian Pendataan di Kecamatan Besuki



Gambar Wawancara dengan Bapak Yudi Suryantono selaku Kepala Desa Demung



Gambar Wawancara dengan Bapak Sualis Selaku Kepala Desa Widoro Payung



Gambar plengsengan yang telah dibangun dan yang sebelah kiri belum dibangun di Kecamatan Besuki



Gamabar pembangunan plengsengan di Kecamatan Besuki



Gambanr pembangunan plengsengan di Kecamatan Besuki



Gambar pembangunan plengsengan di Kecamatan Besuki



Gambar sungai yang belum dibangun Plengsengan di Kecamatan Besuki



Gambar Sungai yang belum dibangun plengsengan

Gambar Plengsengan belum dibangun sebelah kiri sungai



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

JL. CENDRAWASIH NOMOR: 32 SITUBONDO 63611

Situbondo, 2 Oktober 2017

Nomor : 365/366/431.302.4/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Menyelesaikan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan FISIP Universitas Jember
(UNEJ)

Di-

J E M B E R

Menindak lanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tanggal 3 Juli 2017, nomor: 070/516/431.305.2.2/2017, perihal Rekomendasi Melaksanakan Penelitian, atas:

Nama : ANIS LISTARINI
NIM : 120910201086
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Penelitian : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo tanggal 3 Juli 2017 s/d 29 September 2017.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**


Drs. TAUFIK HIDAYAT, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590511 197811 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI
Jalan Raya Situbondo Nomor 59 Telepon/Fax (0338) 891085
BESUKI (68356)

Besuki, 17 Oktober 2017

Nomor : 070/78/431.516.4/2017

Sifat : Segera/Penting

Lampiran : -

Perihal : **Menyelesaikan Penelitian**

Kepada :

Yth. Sdr. Dekan FISIP Universitas Jember
(UNIJ)

di -

JEMBER

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 03 Juli 2017 nomer: 070/516/431.305.2.2/2017 perihal Rekomendasi Melaksanakan Penelitian atas :

Nama : ANIS LESTARINI

NIM : 120910201086

Jurusan : Administrasi Negara

Judul /Tema : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam penanganan Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tanggal 03 Juli s/d 29 September 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.



SURIYATNO,SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670121 198603 1001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 2784/UN25.3.1/LT/2017 15 Juni 2017
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik
Kabupaten Situbondo
di -
SITUBONDO

Memperhatikan surat Pengantar dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2221/UN25.1.2/LT/2017 tanggal 8 Juni 2017, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Anis Listarini / 120910201086
Fakultas / Jurusan : FISIP / Administrasi Negara
Alamat : Jl. Bangka Raya No. 1 Jember / No. Hp. 081331024751
Judul Penelitian : Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
Lokasi Penelitian : Nama – Nama Instansi di Kabupaten Situbondo
Lama Penelitian : Dua Bulan (15 Juni – 15 Agustus 2017)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

Ketua
Sekretaris III,
Khadim Ham, S.T., M.T
04052005011002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. ISIP Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nama – Nama Instansi di Kabupaten Situbondo :

1. Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Situbondo
2. Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo
3. Desa Besuki Kabupaten Situbondo
4. Desa Demung Kabupaten Situbondo
5. Desa Kalimas Kabupaten Situbondo
6. Desa Langkap Kabupaten Situbondo
7. Desa Bloro Kabupaten Situbondo
8. Desa Pesisir Kabupaten Situbondo
9. Desa Sumberejo Kabupaten Situbondo
10. Desa Widoro Payung Kabupaten Situbondo
11. Desa Belimbing Kabupaten Situbondo
12. Desa Jetis Kabupaten Situbondo



CERTIFICATE NO : QMS/173



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. PB. SUDIRMAN KEL. PATOKAN TELP/FAX (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Situbondo, 03 Juli 2017

Nomor : 070/516/431.305.2.2 /2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : REKOMENDASI

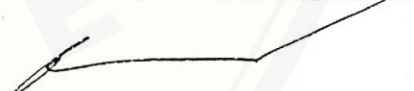
Kepada :
Yth. 1. Kepala BPBD Situbondo
2. Camat Besuki
Kabupaten Situbondo
di -

SITUBONDO

Menunjuk surat Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 0784/UN25.3.1/LT/2017, perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi dengan hormat Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo tanggal 03 Juli 2017 Nomor : 070/515/431.305.2.2/2017 atas nama ANIS LISTARINI / NIM. 120910201086 dengan judul proposal "*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Situbondo dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo*" untuk mendapatkan tindak lanjut dari instansi tujuan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Ap. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan


RUDI MULYONO, SP.,M.MA
Penata Tk. I
NIP. 19720627 200112 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. PB. SUDIRMAN TELP. KEL. PATOKAN TELP/FAX. (0338) 671 927
 SITUBONDO 68312

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/515/431.305.2.2/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Menimbang : Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember, tanggal 15 Juni 2017 Nomor : 0784/UN25.3.1/LT/2017, perihal Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian, atas nama ANIS LISTARINI / NIM. 120910201086.

Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : ANIS LISTARINI / NIM. 120910201086
 b. Alamat / Tlp : Tanjung Pecinan Kec. Mangaran Kab. Situbondo
 HP. 081 331 024 751
 c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 d. Instansi/Organisasi : Universitas Jember
 e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :

- a. Tujuan : Tugas Akhir Skripsi
 b. Bidang : FISIP
 c. Penanggung Jawab : Drs. Supranoto, M.Si.
 d. Anggota/Peserta : -
 e. Waktu kegiatan : 03 Juli s/d 03 Agustus 2017
 g. Lokasi Kegiatan : Wilayah Kerja Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SITUBONDO
 Kepala Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan

RUDI MULYONO, SP.,M.MA
 Penata Tk. I
 NIP. 19720627 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember;
2. Sdr. Yang Bersangkutan;
3. Arsip.